



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : SUCI BASKORO WATI
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 711665

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 538.500.000

- MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC CVT CKD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
- MOTOR, YAMAHA MIO 125CW Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOTOR, YAMAHA MIO/AL115S 5TL CW Tahun 2007, WARISAN Rp. 2.500.000
- MOTOR, YAMAHA 54P (CAST WHEEL) A/T Tahun 2012, WARISAN Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 296.763.996

F. HARTA LAINNYA Rp. 75.000.000

Sub Total Rp. 3.510.263.996

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.510.263.996

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.